

**STRATEGI PENANGGULANGAN *EIGENRICHTING* DENGAN
PENDEKATAN TEORI KRIMINOLOGI
(STUDI WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG KOTA)**

TESIS



**Disusun oleh:
TRIYONO SUSANTO
NIM: 201810380211021**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Juli 2020

**STRATEGI PENANGGULANGAN *EIGENRICHTING* DENGAN
PENDEKATAN TEORI KRIMINOLOGI
(STUDI WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG KOTA)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

TRIYONO SUSANTO

NIM: 201810380211021

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Juli 2020

**STRATEGI PENANGGULANGAN *EIGENRICHTING*
DENGAN PENDEKATAN TEORI KRIMINOLOGI
(STUDI WILAYAH HUKUM POLRESTA
MALANG KOTA)**

Diajukan oleh:

TRİYONO SUSANTO
201810380211021

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Senin/10 Agustus 2020**

Pembimbing Utama



Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.

Pembimbing Pendamping



Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum.

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. A. K. Sanjani In'am, Ph.D.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

TRIYONO SUSANTO

201810380211021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jum'at/24 Juli 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.
Sekretaris	:	Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum.
Penguji I	:	Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum.
Penguji II	:	Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: **“Strategi Penanggulangan *Eigenrichting* dengan Pendekatan Teori Kriminologi (Studi Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat gelar S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan tesis ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian ini tidak terlepas dari jasa-jasa berbagai pihak, ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada Istri (Lisaadah, S.T) dan anak-anak tercinta (Tri Sukma Adimasworo, Tri Andhika Wiratama dan Diska Trilis Rahmania Putri), serta untuk keluarga besar yang telah memberikan support dan doa demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah kado terindah dalam hidup penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga terselesaikan program studi Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing, mengarahkan dan menyetujui dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Tata Usaha Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, atas pelayanan administrasi.
7. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum angkatan 2018, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
8. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan tesis ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 07 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Daftar Penguji	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Surat Pernyataan	viii
Abstraksi	ix
Abstract.....	x
 Latar Belakang	 1
Rumusan Masalah	5
Tujuan Penelitian	5
Originalitas Penelitian	5
Kerangka Teori	
Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	
<i>Eigenrichting</i>	7
Penegakan Hukum <i>Eigenrichting</i> dengan Teori Kriminologi	8
Metodologi	16
Hasil Penelitian dan Pembahasan	
Konstruksi Hukum <i>Eigenrichting</i> dalam Perspektif Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota	16
Faktor Kriminogen yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Eigenrichting</i> di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota	24
Strategi Penanggulangan <i>Eigenrichting</i> yang Ideal dengan Pendekatan Teori Kriminologi di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota	28
Kesimpulan dan Saran	
Kesimpulan	32
Saran	33
Daftar Pustaka	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sampel <i>Eigenrichting</i> di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota	4
Tabel 2. Data Sepuluh Besar Kriminalitas Tahun 2018-2019 di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota	17



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **TRİYONO SUSANTO**

NIM : **201810380211021**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul : **STRATEGI PENANGGULANGAN *EIGENRICHTING* DENGAN PENDEKATAN TEORI KRIMINOLOGI (STUDI WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG KOTA)** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Juli 2020

Yang menyatakan,



TRİYONO SUSANTO

ABSTRAKSI

Nama : Triyono Susanto
NIM : 201810380211021
Judul : Strategi Penanggulangan *Eigenrichting* dengan Pendekatan Teori Kriminologi (Studi Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)
Pembimbing : 1. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. NIDN: 0017056501
2. Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum. NIDN: 1307671

Masih maraknya *eigenrichting* khususnya di wilayah hukum Polresta Malang Kota dipengaruhi oleh lemahnya kesadaran masyarakat akan hukum dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum serta penegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan data diperoleh yang termasuk *eigenrichting* masuk ke dalam jenis kriminalitas “penganiayaan ringan dan pengeroyokan dengan prosentase di tahun 2018 sebanyak 7,03% dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 10,02%. Data kriminalitas tersebut merupakan yang lapor, sedangkan data kriminalitas yang selesai khusus *eigenrichting* pada tahun 2018 sebesar 9,48% dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 8,57%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian kasus *eigenrichting* belum maksimal.

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain untuk mengetahui konstruksi hukum *eigenrichting* dalam perspektif hukum pidana, faktor kriminogen yang mempengaruhi terjadinya *eigenrichting* dan strategi penanggulangan *eigenrichting* yang ideal dengan pendekatan teori kriminologi di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Adapun data yang digunakan adalah data primer (Berkas Perkara dari tahun 2018-2019) dengan cara studi lapang, sedangkan data sekunder didapat dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis.

Bentuk *eigenrichting* yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota diantaranya diatur dalam Pasal 170 jo Pasal 53 jo Pasal 55, Pasal 338, Pasal 340 dan Pasal 351 KUHP. Dimana sebelumnya sudah terjadi konflik yang dipicu oleh pelaku serta alasan pelaku melakukan *eigenrichting* karena kurangnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum dan tidak bisa mengumpulkan alat bukti untuk dilaporkan kepada pihak berwajib. Faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi *eigenrichting* di wilayah hukum Polresta Malang Kota adalah sebagai berikut: faktor biologis (teori psikiatrik), faktor psikologis (kekacauan mental dan pengembangan moral), faktor sosiologis (teori ekologis dan faktor ekonomi) dan faktor perspektif lain (labelling, teori konflik, teori kontrol dan teori NKK). Strategi penanggulangan *eigenrichting* di wilayah hukum Polresta Malang Kota dilakukan melalui upaya penal dan non penal.

Kata Kunci: *Eigenrichting*, Teori Kriminologi, Strategi Penanggulangan.

ABSTRACT

Name : Triyono Susanto
NIM : 201810380211021
Title : *The Strategies Eigenrichting with the Approach Criminology Theory*
(Study Jurisdiction Polresta Malang Kota)
Advisors : 1. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. NIDN: 0017056501
2. Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum. NIDN: 1307671

The widespread eigenrichting especially in the jurisdiction Polresta Malang Kota poor influenced community awareness about law and lack of confidence to the law enforcement officials and law enforcement itself. Based on data is collected in including eigenrichting type crime the light and beatings with prosentase in 2018 as many as 7,03 % and has increased in 2019 be 10,02 %. Crime data was report, data on have done eigenrichting in 2018 of 9,48 % and from the year 2019 be 8,57 %. From the data it can be seen that the cases eigenrichting not maximum.

He did the research are among others to know the construction of law eigenrichting in perspective criminal law, forms factors affecting the kriminogen eigenrichting reduction strategy and the ideal with approach criminology in the jurisdiction of the unfortunate Polresta Malang Kota. This study using methods empirical juridical approach. But the data used was the primary data (docket in a roomy study 2018-2019), while secondary data obtained by means of a study literature. Data analysis done by means of descriptive analytical.

Form eigenrichting happened in the jurisdiction Polresta Malang Kota set in article 170 jo article, article 55 jo 53 article 338, article 340 and articles kuhp 351. Where previously conflict triggered the agents and reason do eigenrichting because lack of confidence to the law enforcement and can process a evidence to be reported to the police. Kriminogen factors affecting eigenrichting in the jurisdiction Polresta Malang Kota is as follows: biological factors (theory psikiatrik), psychological factors (mental derangement and development), theory the ecology (sociological and economic factors) and factors other perspective (labelling, theory conflict, theory control and theory NKK). Eigenrichting reduction strategy in the jurisdiction Polresta Malang Kota was undertaken through the effort to penal and non penal.

Keywords: *Eigenrichting, Criminology Theory, The Strategy*

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengidealkan hukum sebagai sumber inspirasi, motivasi sekaligus pengontrol penyelenggara segala aktifitas kehidupan dan kenegaraan. Makna negara hukum memberikan dasar dan arahan bahwa setiap perilaku masyarakat dan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi terwujudnya ketertiban tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat mengalami perkembangan di segala bidang yang sangat cepat baik itu kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi serta keamanan. Perkembangan tersebut juga membawa dampak negatif yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat karena adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan.¹ Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukum merupakan bagian yang sangat penting. Tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat, masih ada yang tidak peduli dengan hukum yang berlaku. Sehingga pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum. Bahkan terkadang mereka menggunakan hukum rimba karena hukum yang ada saat ini tidak mempunyai wibawa. Ketidakwibawaan hukum disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan penegakan hukum itu sendiri terhadap permasalahan yang terjadi masyarakat. Selain itu juga faktor budaya di masyarakat mempengaruhi cara masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah di lingkungannya.

Penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat karena tidak adanya wibawa hukum menjadikan masyarakat masa bodoh. Sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Hal tersebut yang akan menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk main hakim sendiri dibanding menyerahkan

¹ Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 1.

sepenuhnya ke aparat penegak hukum.² Pada akhirnya terdapat kebiasaan menghakimi sendiri pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum yang sebagaimana mestinya. Tindakan tersebut dalam istilah Belanda disebut “*eigenrichting*” atau sering disebut dengan “main hakim sendiri”.

Ironisnya *eigenrichting* dalam perspektif masyarakat bukanlah sesuatu hal yang salah, bahkan dianggap sebagai suatu tindakan yang dibenarkan. Padahal apapun alasannya, dasar dan motivasinya oleh negara dianggap sebagai perbuatan yang salah dan melanggar negara hukum. Konsepsi negara hukum memandang hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial dan pengendalian sosial. Hukum yang ditempatkan sebagai alat untuk merubah perilaku sosial dari tidak tertib menjadi tertib, harus menjadi dasar dari perwujudan tata kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik berbangsa dan bernegara. Sependapat dengan Sulistyowati Irianto, hukum memiliki banyak dimensi oleh karenanya harus dipelajari dengan menempatkan pada konteks sosial, budaya, ekonomi, politik secara holistik.³

Eigenrichting dalam Berkas Perkara BP/27/IV/2018/Satreskrim, BP/04/III/2019/Reskrim, BP/30/III/2019/Satreskrim yang didapat dari studi lapang di Polresta Malang Kota diatur pada Pasal 170 jo Pasal 53 jo Pasal 55, Pasal 338, Pasal 340 dan Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP. *Eigenrichting* juga melanggar Pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup, memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama di depan hukum serta melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Masih maraknya *eigenrichting* dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, lemahnya penegakan hukum serta ketidakpercayaan masyarakat akan aparat penegak hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Sedangkan fungsi hukum menurut Zelsick bersifat elementer, yaitu hukum

² Nurcahyaningih, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, Hlm. 2.

³ Sulistyowati Irianto, 2009, *Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor, Hlm. 15.

hanya berfungsi untuk menjaga ketentraman, menyelesaikan sengketa dan menindas pembangkangan.⁴

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada unsur hukumnya saja, melainkan juga pada komponen-komponen penting lainnya yaitu penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakatnya. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa untuk memahami bekerjanya hukum sebagai suatu sistem, maka hukum harus dipelajari dari beberapa elemen, yaitu: **Struktur Hukum (*structure of law*)**, yang meliputi Lembaga pembuat hukum (*law making institutions*) dan institusi penegak hukum (*law enforcement agencies*) seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga hukum lainnya. **Substansi Hukum (*substance of law*)**, yang meliputi semua produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Budaya Hukum (*legal culture*)**, seperti nilai-nilai, ide, persepsi, keyakinan termasuk harapan-harapan masyarakat terhadap substansi hukum dan struktur hukum.⁵ Selain itu juga terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor kriminogen baik dari internal maupun eksternal diri pelaku.

Eigenrichting terjadi di semua daerah dengan faktor dan modus operandi yang berbeda-beda. Hal tersebut salah satunya terjadi di Kota Malang. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2018 dari jumlah 10 besar kriminalitas di Kota Malang diperoleh 1038 dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 778. Data tersebut di dalamnya juga termasuk *eigenrichting* yang masuk ke dalam jenis kriminalitas “penganiayaan ringan, penganiayaan berat, pembunuhan dan pengeroiyokan dengan prosentase di tahun 2018 sebanyak 7,03% dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 10,02%. Data kriminalitas tersebut merupakan yang lapor, sedangkan data kriminalitas yang selesai khusus *eigenrichting* pada tahun 2018 sebesar 9,48% dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 8,57%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian kasus *eigenrichting* belum maksimal. Ada beberapa kasus *eigenrichting* yang terjadi di Kota Malang dari tahun 2018-2019, diantaranya:

⁴ Nonet dan Zelnick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper Torchbooks, Hlm. 8.

⁵ Lawrence Friedman, 1977, *Law and Society*, an Introduction, Hlm. 6-7.

Tabel. 1
Sampel *Eigenrichting* di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota

No	Nomor Berkas Perkara	Keterangan	Pasal yang Dilanggar
1	BP/27/IV/2018/Satreskrim	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku: H. Moh. Rofik alias Haji Robi - Tempus: Minggu, tanggal 29 November 2015 sekitar pukul 08.30 WIB - Locus: Parkiran Gadang Square Jl. Satsul Tubun Kec. Sukun, Kota Malang 	Percobaan Pembunuhan Berencana Subsider Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Subs Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP
2	BP/04/III/2019/Reskrim	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku: Sahri - Tempus: Rabu, 20 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB - Locus: Jl. Mayjen Sugkono Gg. IX RT. 01 RW. 04 Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang 	Pembunuhan dan/atau Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan/atau 351 KUHP
3	BP/30/III/2019/Satreskrim	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku: Trio Ady Wiyata - Tempus: Selasa, 12 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB - Locus: Jl. Ir. H. Juanda I-A RT. 06 RW. 02 Kel. Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang 	Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Sumber: Berkas Perkara yang didapat dari Polresta Malang Kota

Kota Malang dengan penduduk yang kompleks dari berbagai daerah bahkan negara serta multikultural. Terdapat 63 Perguruan Tinggi terdiri dari 4 Perguruan Tinggi Negeri dan 59 Perguruan Tinggi Swasta. Polresta Malang Kota merupakan Polres tipe Metropolitan yang melakukan penegakan hukum lebih modern. Kesemuanya juga menjadi latar belakang alasan dilakukannya penelitian ini dan pemilihan lokasi penelitian. Dari uraian tersebut di atas peneliti ingin menemukan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Maka dari itu, peneliti mengambil judul “**Strategi Penanggulangan *Eigenrichting* dengan Pendekatan Teori Kriminologi (Studi Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)**”.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah yang terkait dengan pemaparan latar belakang sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum *eigenrichting* dalam perspektif hukum pidana di wilayah hukum Polresta Malang Kota?
2. Apakah faktor kriminogen yang mempengaruhi terjadinya *eigenrichting* di wilayah hukum Polresta Malang Kota?
3. Bagaimana strategi penanggulangan *eigenrichting* yang ideal dengan pendekatan teori kriminologi di wilayah hukum Polresta Malang Kota?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut?

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum *eigenrichting* dalam perspektif hukum pidana di wilayah hukum Polresta Malang Kota.
2. Untuk mengetahui faktor kriminogen yang mempengaruhi terjadinya *eigenrichting* di wilayah hukum Polresta Malang Kota.
3. Untuk mengetahui strategi penanggulangan *eigenrichting* yang ideal dengan pendekatan teori kriminologi di wilayah hukum Polresta Malang Kota.

Originalitas Penelitian

Untuk mengetahui originalitas/keaslian penelitian, untuk itu peneliti memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai alat pembandingan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu dapat diketahui perbedaan substansi, sehingga dapat diketahui keasliannya, diantaranya:

1. Lidya Suryani Widayati⁶
Judul: Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Kasus Begal
Fokus penelitian penulis terkait:
 - a. Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri.
 - b. Tindakan main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana.

⁶ Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Kasus Begal*, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VII, No. 05/I/PEDI/Maret/2015, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Hasil penelitian:

- a. Faktor tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari tumpukan kemarahan atau kekecewaan masyarakat terhadap semakin maraknya kasus begal dan lemahnya penegakan hukum.
- b. Tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh karena itu, salah satu strategi penanggulangan tindakan main hakim sendiri adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

2. Fitriati⁷

Judul: Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis

Fokus penelitian penulis terkait:

- a. Perbuatan main hakim sendiri dalam kajian kriminologis.
- b. Perbuatan main hakim sendiri dalam kajian sosiologis.

Hasil penelitian:

- a. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat yang merupakan objek kriminologi terutama dalam menganalisis sebab-sebab berbuat kejahatan. Main hakim sendiri terjadi karena keretakan hubungan antara penjahat dan korban yang tidak segera dipecahkan.
- b. Berbagai macam alasan dikemukakan sebagai alasan main hakim sendiri. Hal yang banyak dijadikan alasan adalah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

3. Wartiningsih⁸

Judul: Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigen Richting*) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura

Fokus penelitian penulis terkait:

- a. Alasan melakukan tindakan main hakim sendiri dalam pencurian sapi.
- b. Alasan aparat penegak hukum melakukan pembiaran terhadap pelaku.

Hasil penelitian:

- a. Alasan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri adalah: Polisi seringkali datang terlambat di TKP; apabila diproses melalui; peradilan membutuhkan waktu yang lama; sanksi yang dijatuhkan hakim tidak memberikan efek jera.
- b. Polisi melakukan “pembiaran” dalam arti masyarakat yang mestinya bertanggung jawab secara pidana dibebaskan dari sanksi. Hal tersebut polisi merasa kesulitan mencari bukti dan saksi.

4. Rayon Syaputra⁹

Judul: Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti

⁷ Fitriati, *Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis*, Jurnal Skripsi MMH, Jilid 41 No. 2 April 2012, Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa.

⁸ Wartiningsih, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura*, Jurnal Skripsi Rechtidee, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.

⁹ Rayon Syaputra, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti*, JOM Fakultas Hukum Volume 1, Nomor 1, Februari 2015.

Fokus penelitian penulis terkait:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan *eigenrichting* di wilayah hukum Polsek Cerenti.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Polsek Cerenti dalam melakukan penegakan hukum terhadap *eigenrichting*.
- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum *eigenrichting*.

Hasil penelitian:

- a. Faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah karena Faktor budaya hukum masyarakat, dan faktor kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- b. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri adalah jumlah personil Kepolisian yang masih terbatas, kurangnya dukungan masyarakat.
- c. Upaya yang dilakukan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus *eigenrichting* di wilayah hukum Polsek Cerenti adalah dengan melakukan koordinasi secara massif antara masyarakat dan kepolisian dan melakukan penyuluhan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu di atas secara garis besar membahas terkait faktor dan upaya penanggulangan *eigenrichting*. Tetapi yang membedakan dengan penelitian ini bahwa *eigenrichting* yang terjadi di setiap daerah itu berbeda dan sampai sekarang belum menemukan solusi yang tepat untuk menanggulanginya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus kajiannya di Polresta Malang Kota, dengan memperhatikan bentuk *eigenrichting* yang dikaitkan dengan Teori Kriminologi yaitu sebab-sebab terjadinya tindak pidana. Sehingga ditemukan strategi penanggulangan yang tepat.

Kerangka Teori

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Eigenrichting

Tindakan main hakim sendiri yang diistilahkan oleh masyarakat luas sebagai pengakiman massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri atau mengambil hak orang lain tanpa mengindahkan hukum yang ada. Rendahnya kesadaran hukum

mengakibatkan dilanggarnya hak-hak orang lain karena adanya tindakan main hakim sendiri. Karena seseorang yang melakukan kejahatan belum bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan sehingga hak-haknya masih dilindungi.¹⁰

Dikatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Tindakan main hakim sendiri memiliki unsur kesengajaan yang diniatkan karena adanya konflik terlebih dahulu, yang mengakibatkan luka atau cedera bahkan hilangnya nyawa seseorang. KUHP belum mengatur secara khusus tindakan main hakim sendiri, untuk itu pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai pasal dalam KUHP.

Penegakan Hukum *Eigenrichting* dengan Teori Kriminologi

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹ Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.¹²

Kriminologi ditemukan oleh P. TOPinard pada tahun 1830-1911 yang merupakan ahli antropologi Prancis, secara harfiah kriminologi berasal dari kata *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Jadi kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.¹³ Menurut WME. Noach kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan serta akibat yang ditimbulkan.¹⁴

¹⁰ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 167

¹¹ Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 37.

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 42.

¹³ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, Hlm. 61.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 2.

Dalam ilmu kriminologi dikenal beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan yang biasanya disebut dengan teori kriminologi. Teori-teori kriminologi tentang sebab terjadinya kejahatan, sebagai berikut:

a. Kejahatan dalam Perspektif Biologis

Kejahatan dalam perspektif biologis berpendapat bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasar yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Ada yang menitikberatkan pada kejahatan yang disebabkan oleh faktor “gen”, adapula yang mengambil kesimpulan berdasarkan ciri fisik, diantaranya:

1) Teori *Born Criminal*

Cesare Lambroso pada tahun 1835-1909 mencetuskan teori *born criminal*, ide tersebut diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dalam teori ini Lambroso membantah sifat *freewill* yang dimiliki oleh manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang. Gen tersebut dapat sewaktu-waktu muncul yang menyebabkan sifat jahat pada manusia. Penjelasan Lambroso di awal menjelaskan bahwa seseorang penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik dari orang yang bukan penjahat.¹⁵

2) Teori Mental Tester

Teori mental tester dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan mana yang penjahat dan bukan penjahat. Teori ini muncul untuk menjawab apa yang tidak bisa dikemukakan oleh Lambroso. Seorang penjahat adalah orang yang otaknya lemah, sehingga tidak bisa menilai perbuatan yang akan dilakukan serta akibat yang akan ditimbulkan. Kelemahan otak dalam teori ini merupakan bawaan sejak lahir yang merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, Hlm. 72.

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 55.

3) Teori Psikiatrik

Teori ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lambrosso bahwa seseorang yang melakukan kejahatan itu bukan karena psikosis, epilepsi serta moral insanity tetapi pada gangguan emosional (unsur psikologi). Menurut teori ini gangguan emosional dipengaruhi oleh interaksi sosial.¹⁷

b. Kejahatan dalam Perspektif Psikologis

Studi psikologi atas penyebab munculnya kejahatan dapat dikatakan jauh lebih maju daripada studi biologi, sebab dalam studi psikologi yang memandang kejahatan disebabkan kondisi pelaku yang abnormal, cacat mental, guncangan jiwa yang maha berat telah menganjurkan perbaikan melalui rehabilitasi, perawatan bagi orang yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau orang yang diprediksikan akan melakukan kejahatan, diantaranya:

1) Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud (1856-1939) penemu *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas merupakan hasil dari *anoveractive conscience* menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.¹⁸

2) Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Philipe Pinel seorang dokter Perancis

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 2018, Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 56.

menyebut “kekacauan mental” sebagai *manie sans delire (madness without confusion)*. Pada dewasa ini, penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy*, yakni sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek dan tidak pernah merasa bersalah.¹⁹

3) Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* yang menunjukkan aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman.

4) Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku nakal dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku tidak nakal. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat.²⁰

c. Kejahatan dalam Perspektif Sosiologis

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain yang tidak melanggar norma dipelajari. Menurut H. Manheim teori-teori sosiologi criminal dibedakan ke dalam:

1) Teori yang berorientasi pada kelas sosial

Menurut teori ini sebab-sebab terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh perbedaan kelas sosial dan konflik yang ada di dalamnya.

2) Teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial

Menurut teori ini sebab-sebab terjadinya kejahatan tidak dari kelas sosial melainkan dari aspek lain yaitu lingkungan, kependudukan,

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 57.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 58-59.

kemiskinan, dan lain sebagainya. Dalam teori ini termasuk juga kejahatan disebabkan oleh faktor ekologis, konflik kebudayaan, ekonomi dan *differential association*.

a) Teori Ekologis

Sebab-sebab terjadinya kejahatan menurut I.S Susanto terjadi karena faktor lingkungan dan sosial seperti:²¹ mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi, pemukiman kumuh serta daerah rawan kejahatan yang memiliki hubungan erat akan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar masyarakat.

b) Teori Konflik Kebudayaan

Kejahatan juga bisa terjadi karena adanya konflik kebudayaan diantaranya: budaya besar menguasai budaya kecil, bertemunya dua budaya besar, pindahnya anggota dari suatu budaya ke budaya lain yang dapat mengakibatkan pergeseran antar kelompok.

c) Teori Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki hubungan dengan terjadinya kejahatan dengan beberapa pertimbangan antara lain:²²

- (1) Membandingkan keadaan ekonomi dari kelompok penjahat dan bukan penjahat sebagai bentuk kontrol.
- (2) Menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan.
- (3) Melakukan studi kasus terhadap pengaruh kondisi ekonomi dengan individu yang melakukan kejahatan.

d) Teori *Differential Association*

Teori ini menitikberatkan pada proses belajar seseorang. Setiap perbuatan yang dilakukan mempunyai sebab yang menjadi faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Pengkajian

²¹ A.S. Alam, *Op. Cit*, Hlm. 61.

²² I.S. Susanto, 1991, *Diktak Kriminologi*, Semarang: PT. Tiga Serangkai, Hlm. 56.

terhadap sebab terjadinya kejahatan merupakan salah satu yang menentukan jadinya mental, karakter seseorang.²³

d. Kejahatan dari Perspektif Lain

1) Teori Labeling

Pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan seseorang justru sebaliknya. Proses pemberian label merupakan seseorang menjadi jahat. Dalam pemberian label ada dua hal yang harus diperhatikan:²⁴

- a) Pemberian label akan menjadi perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label.
- b) Penerimaan individu terhadap label yang diberikan dan menjalankan sebagaimana label yang diberikan padanya. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku jahat pada individu tersebut.

2) Teori Konflik

Pendekatan teori konflik terhadap penyimpangan terjadinya kejahatan yang paling banyak diaplikasikan. Kejahatan terjadi karena adanya konflik sebelumnya. Selain itu juga ada hubungannya dengan penjelasan norma, peraturan dan hukum yang berlaku.

3) Teori Kontrol

Lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kelompok yang lemah ikatan sosial atau kelas bawa cenderung akan melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan kelompok lainnya. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok lainnya, cenderung sedikit sekali melakukan penyimpangan.

4) Teori Niat, Kesempatan, Kejahatan (NKK)

Teori NKK merupakan teori baru yang menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di masyarakat:

²³ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, Hlm. 74.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 110.

$$N+K1=K2$$

Keterangan : N : Niat

K1 : Kesempatan

K2 : Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitupun sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan. Komponen niat dan kesempatan yang dipadukan sangat menentukan terjadinya kejahatan.

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan termasuk bidang *criminal policy*. Kebijakan *criminal* juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dari semua itu pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan masyarakat atau *social defence*. Akan tetapi juga, terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan, perlindungan masyarakat yang bersipat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.²⁵

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.

a. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁶ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, Hlm. 76.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, Hlm. 46

hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁷

Upaya represif dalam penerapannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Penanggulangan dengan upaya represif dilakukan dengan menindak pelaku agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum dan merugikan masyarakat, serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dalam upaya represif semua sub-sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Masyarakat dan Kepengacaraan yang saling berhubungan untuk menerapkan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik.

b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁸ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Dalam penanggulangan secara non penal juga dikenal dengan upaya pre-emptif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dengan

²⁷ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, Hlm. 390.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hlm. 72.

menanamkan nilai dan norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan seseorang melakukan kejahatan tetapi tidak ada niat karena mampu membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer diantaranya Berkas Perkara dari tahun 2018-2019. Sedangkan data sekunder antara lain buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, artikel, jurnal dll. Adapun peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam data sekunder antara lain: UUD NRI 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapang di Polresta Malang Kota dengan cara mendokumentasikan Berkas Perkara dari tahun 2018-2019. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analitis ini yaitu penulis melakukan langkah-langkah berupa pengumpulan data lapangan, kemudian diolah dengan cara memadukan atau menarik hubungan/korelasi dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang bertujuan mendapatkan jawaban atas permasalahan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konstruksi Hukum *Eigenrichting* dalam Perspektif Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota

Data yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan penelitian lapang di Polresta Malang Kota berupa Berkas Perkara tahun 2018-2019 yang berkaitan dengan *eigenrichting* kemudian nantinya digunakan sebagai pedoman untuk melakukan analisis. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel. 2
Data Sepuluh Besar Kriminalitas Tahun 2018-2019
di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota

No	Peristiwa	2018		2019	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	Pencurian Kendaraan Bermotor	267	128	222	76
2	Narkoba	244	244	210	210
3	Penggelapan	126	128	119	14
4	Pencurian Biasa	106	24	82	10
5	Miras	104	104	10	10
6	Pencurian dengan Pemberatan	66	130	29	45
7	Penganiayaan Ringan	51	69	62	31
8	Penipuan	48	74	20	3
9	Pengeroyokan	22	19	16	5
10	Pencurian dengan Kekerasan	4	8	8	16
Jumlah		1038	928	778	420

Sumber: Data Kriminalitas Polresta Malang Kota tahun 2018-2019

Dari data tersebut diperoleh bahwa kriminalitas yang termasuk *eigenrichting* yaitu penganiayaan ringan dan pengeroyokan yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan 2019 dengan keterangan lapor dan selesai. Bahwa jumlah data yang lapor tidak signifikan dengan data yang selesai, dalam artian mengalami penurunan. Jumlah keseluruhan kriminalitas di wilayah hukum Polresta Malang Kota pada tahun 2018-2019 memang mengalami penurunan tetapi tidak untuk *eigenrichting*. Jumlah *eigenrichting* keseluruhan yang lapor pada tahun 2018 sebanyak 73 dan tahun 2019 sebanyak 78, artinya hal tersebut mengalami kenaikan. Tetapi untuk perkara yang selesai mengalami penurunan yaitu tahun 2018 sebanyak 88 menjadi tahun 2019 sebanyak 36. Hal tersebut patut dipertanyakan, karena kasus mengalami kenaikan, tetapi penyelesaian perkaranya justru mengalami penurunan.

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap

bersalah karena melakukan suatu kejahatan.²⁹ Dalam *Jung Dictionary of Law*, tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan seseorang atau kelompok baik terorganisir maupun tidak secara sewenang-wenang yang dilakukan untuk memberikan sanksi tanpa adanya putusan pengadilan. Hal tersebut dilatarbelakangi karena kurangnya kepercayaan kepada penegakan hukum dan aparat penegak hukum. Bentuk-bentuk *eigenrichting* di wilayah hukum Polresta Malang Kota dapat diketahui melalui data lapangan yang diperoleh ketika melakukan penelitian yaitu berupa Berkas Perkara sejak tahun 2018-2019, dengan uraian sebagai berikut:

a. Berkas Perkara No. BP/27/IV/2018/Satreskrim (Kasus I)

- Pelaku : H. Moh. Rofik alias Haji Robi
- Tempus : Minggu, tanggal 29 November 2015
sekitar pukul 08.30 WIB
- Locus : Parkiran Gadang Square Jl. Satsul Tubun
Kec. Sukun, Kota Malang

Berawal dari hari Jum'at, tanggal 27 November 2015 seorang yang bernama Fauzan yang merupakan adik pelaku telah menjadi korban penganiayaan (pembacokan) di pasar Gadang oleh Abdur Rohman (sudah divonis) karena masalah parkir. Setelah itu keluarga Madura berdatangan ke Kota Malang untuk menjenguk Fauzan. Setelah itu pelaku bercerita kepada saudara-saudara bahwa korban adalah aktor dari penganiayaan adiknya dan mencari solusi.

Pada hari Minggu, 29 November 2015, sekitar pukul 08.00 WIB, pelaku hendak pulang dari pasar Gadang dan melihat korban sedang parkir di depan Alfamart. Setelah itu pelaku menyampaikan keberadaan korban kepada para pelaku lainnya lainnya (saudara pelaku). Sekitar 45 menit para pelaku berangkat bersama-sama dengan mengendarai 2 unit mobil diantaranya Honda CRV warna putih Nopol: B-1193-FJA dan mobil Innova warna silver Nopol: L-1706-RS dengan masing-masing membawa senjata tajam. Sesampainya pasar Gadang para pelaku

²⁹ Fitriati, *Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis*, MMH, Jilid 41 No. 2 April 2012, Hlm. 162.

bergegas turun dari mobil dan langsung melakukan pembacokan, sehingga korban tergeletak dan tidak bergerak serta mengeluarkan banyak darah, para pelaku kemudian masuk ke dalam mobil dan melarikan diri.

Karena hal tersebut korban mengalami luka sabetan pada punggung sebelah kanan, luka sabetan punggung atas sebelah kanan dan kiri, paha sebelah kiri, ibu jari dan telunjuk sebelah kanan terpotong, luka sabetan pada leher sebelah kanan, luka tusuk pada rusuk sebelah kanan mengenai paru-paru, luka sabetan pada betis sebelah kiri dan memar pada bagian perut. Perbuatan tersangka diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Subs Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP yaitu Percobaan Pembunuhan Berencana Subsider Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Berat.

Unsur-Unsur yang disangkakan kepada tersangka adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 340 KUHP³⁰
 - a) Barangsiapa, adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
 - b) Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif);
 - c) Dengan rencana terlebih dahulu, adalah terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu kemudian diikuti dengan tindakannya.
 - d) Menghilangkan nyawa orang lain, adalah perbuatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain (objek).
- 2) Pasal 53 (Percobaan)
 - a) Niat, adalah menurut Prof. Moeljatno:
 - (1) Dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap/*voltooide pooging*) niat sama dengan kesengajaan;
 - (2) Dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti atau tidak lengkap) niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif.
 - b) Permulaan pelaksanaan, harus memenuhi 3 syarat:
 - (1) Secara objektif, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik yang ditujukan atau harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang akan dilakukan tersebut;

³⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 62.

- (2) Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan pada delik yang tertentu tadi;
- (3) Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- c) Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak, yang disebabkan oleh:
 - (1) Adanya penghalang fisik;
 - (2) Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik;
 - (3) Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor khusus pada objek yang menjadi sasaran.
- 3) Pasal 55 (turut melakukan)
- 4) Pasal 170 KUHP
 - a) Barang siapa
Barang siapa diartikan sebagai orang. Dalam tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh orang dalam jumlah besar. Tidak ada batasan di dalam KUHP, menurut para ahli minimal dua orang atau lebih.
 - b) Dimuka umum
Perbuatan tersebut bukan dilakukan di tempat yang tersembunyi, tetapi di tempat yang orang banyak bisa mengakses atau dalam artian lain ada orang lain yang bisa melihat perbuatan tersebut.
 - c) Secara bersama-sama
Dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan persengkokolan baik sebelum atau saat kejadian tersebut.
 - d) Melakukan kekerasan
Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani. Misalnya: memukul dengan menggunakan tangan atau senjata, dll.
 - e) Terhadap orang atau barang
Terhadap orang merupakan siapa saja yang tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang dirusak merupakan barang milik siapa saja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam *eigenrichting*. Karena peristiwa tersebut diawali dengan adanya konflik dimana diduga korban merupakan aktor yang melakukan penganiayaan terhadap adiknya. Perbuatan tersebut juga dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang dilakukan oleh pelaku dan saudara-saudaranya yang turut serta. Sebelum melakukan perbuatannya pelaku dan saudara-saudaranya berunding untuk melaporkan korban atau diselesaikan sendiri. Kalau lapor Polisi pasti dihiraukan karena tidak ada alat bukti permulaan. Sehingga keputusannya

diselesaikan sendiri (main hakim sendiri). Agar kedatangan pelaku tidak diketahui oleh korban, maka pelaku, dkk menggunakan 2 kendaraan (CRV & Innova). Setelah tiba di TKP pelaku beserta saudara-saudaranya langsung menyerang korban.

Hal tersebut termasuk *eigenrichting* karena pelaku tidak menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib, justru menghakimi sendiri dengan alasan pelaku masih menduga bahwa korban adalah otak dibalik penganiayaan adiknya, serta tidak cukupnya alat bukti untuk melaporkan korban kepada pihak yang berwajib. Kepercayaan pelaku kepada aparat penegak hukum juga kurang, sehingga pelaku menganggap itu selesai dengan tangannya sendiri.

b. Berkas Perkara No. BP/04/III/2019/Reskrim (Kasus II)

- Pelaku : Sahri
- Tempus : Rabu, 20 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB
- Locus : Jl. Mayjen Sugkono Gg. IX RT. 01 RW. 04
Kel. Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang

Berawal dari jam 09.00 WIB tersangka keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis sabit/bedog kemudian jam 09.30 WIB tersangka pulang ke rumah untuk membuat minum dan kembali keluar rumah ke tempat pembuatan batu bata yang berada di tepi sungai. Saat itu tersangkat melihat Slamet Riwansa (korban) mengangkut kayu milik Djumali menggunakan pick up milik tersangka bersama Djumali dan Pak No. Setelah korban dan temannya mengangkut kayu sebanyak 2 kali dan kembali ke tempat pembuatan batu bata.

Saat ini Pak No dan Djumali saling ngobrol, sedangkan tersangka dan korban juga. Akhir pembicaraan yaitu korban menanyakan keadaan sapi tersangka “bagaimana keadaannya apakah sudah sembuh?”, kemudian tersangka menjawab “sembuh bagaimana, sudah staya jual perkilo”. Mendengar jawaban tersangka, korban tertawa. Karena hal tersebut tersangka merasa emosi dan khilaf, beranggapan korban yang telah meracuni sapinya. Kemudian memukul/menyabitkan senjata tajam ke arah kepala korban dengan posisi duduk berdampingan.

Sehingga melukai leher bagian belakang. Melihat hal tersebut Pak No dan Djumali lari meninggalkan tempat. Tetapi tersangka memastikan bahwa korban telah meninggal. Setelah itu korban membersihkan senjata tajamnya ke batang pisang dan pergi meninggalkan tempat. Kemudian pergi ke rumah Riyanto untuk meminta tolong diantarkan ke Polsek Kedungkandang untuk melapor.

Perbuatan tersangka diatur dalam Pasal 338 dan/atau 351 KUHP yaitu Pembunuhan dan/atau Penganiayaan. Unsur-Unsur yang disangkakan kepada tersangka adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 338 KUHP
 - a) Adanya perbuatan (menghilangkan nyawa)
 - b) Objeknya adalah nyawa orang lain
 - c) Dengan sengaja dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi:
 - (1) Adanya wujud perbuatan;
 - (2) Adanya suatu kematian (orang lain);
 - (3) Adanya hubungan causalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
- 2) Pasal 351 KUHP
 - a) Adanya kesengajaan
Pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut karena korban telah meracuni sapi.
 - b) Adanya perbuatan
Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu memukul/menyabitkan senjata tajam ke arah kepala korban dengan posisi duduk berdampingan.
 - c) Adanya akibat yang dituju, yaitu luka pada korban yang mengakibatkan meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, maka terang pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan matinya orang. Kejadian tersebut dipicu adanya konflik terlebih dahulu, dimana korban diduga meracuni sapi milik pelaku. Tetapi pelaku tidak menyerahkan hal tersebut ke pihak yang berwajib, justru melakukan main hakim sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku karena menduga korban adalah yang meracuni sapi sehingga meninggal. Tetapi pelaku sendiri tidak mengetahui secara pasti apakah korban benar pelakunya. Pelaku hanya tersinggung dengan perkataan korban dan pernah mengetahui korban berada di kandang pelaku, karena menurut dokter hewan

bahwa sapi pelaku mati disebabkan telah memakan racun. Sehingga ketika ingin dilaporkan ke pihak yang berwajib, pelaku tidak mempunyai cukup bukti.

c. Berkas Perkara No. BP/30/III/2019/Satreskrim (Kasus III)

- Pelaku : Trio Ady Wiyata
- Tempus : Selasa, 12 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB
- Locus : Jl. Ir. H. Juanda I-A RT. 06 RW. 02 Kel. Jodipan,
Kec. Blimbing, Kota Malang

Perbuatan pelaku hanya bentuk solidaritas kepada Abdul Holik yang merupakan teman dekat pelaku, sehingga pelaku merasa ikut bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah adiknya Abdul Holik (Nurlaila). Dimana hal tersebut berawal dari Nurlaila pergi ke kampung warna warni di jodipan untuk mengantarkan undangan pernikahannya dengan Mohamad Mauludin. Kemudian Nurlaila ditegur seseorang tidak dikenal dan bertanya “mau kemana?” dan Nurlaila menjawab “mau mengantar undangan”. Karena orang yang bertanya tidak mendengar, Nurlaila dibentak, dan orang tersebut langsung melarikan diri. Pada akhirnya pulang dan mengadu kepada kakaknya sambal nangis. Kemudian Nurlaila kembali dengan kakak, calon suami dan teman kakaknya untuk mencari orang yang sudah membentak Nurlaila. Sebelumnya kakak dan calon suami menanyakan terlebih dahulu siapa yang punya masalah dengan adiknya kepada korban, selanjutnya dari arah belakang ada yang memukul kepala korban. Ternyata setelah dicari tahu orang yang sudah membentak Nurlaila adalah Achmad Maiju penjual bakpao yang merupakan tetangga korban. Perbuatan tersangka *diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu Penganiayaan.*

Unsur-Unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang disangkakan kepada tersangka adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan
Pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk solidaritas kepada temannya.
- 2) Adanya perbuatan
Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu memukul korban dari belakang.
- 3) Adanya akibat yang dituju, yaitu korban mengalami luka memar dan benjol di kepalanya.

Dari kasus III termasuk dalam *eigenrichting* yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan. Karena dalam kasus III pelaku sengaja melakukan

perbuatan tersebut, dengan dalil solidaritas kepada teman karena adeknya diganggu oleh orang lain. Tetapi hal yang dilakukan pelaku dengan cara yang tidak benar. Pelaku justru melakukan main hakim sendiri, yang berujung salah sasaran dan mengakibatkan orang lain luka. Pelaku melakukan hal tersebut tanpa melaporkan kepada pihak yang berwajib karena permasalahannya hanya sepele, adik temannya merasa dibentak orang lain. Sehingga ketika dilaporkan tidak cukup alat bukti permulaannya.

Faktor Kriminogen yang Mempengaruhi Terjadinya *Eigenrichting* di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Adapun kaitannya dengan penegakan hukum *eigenrichting* di wilayah hukum Polresta Malang Kota, adalah sebagai berikut:

a. Substansi Hukum

Sebagai negara yang menganut sistem Civil Law atau Eropa Kontinental, dikatakan hukum adalah peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut mempengaruhi sistem hukum di Indonesia yaitu asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Hal tersebut berkaitan dengan *eigenrichting* dimana belum diatur secara khusus di dalam KUHP, sehingga mengikuti tindak pidana lain dalam KUHP. Berdampak pada kesulitannya aparat penegak hukum untuk merumuskan *eigenrichting*.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Sebagus apapun peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan kinerja aparat penegak hukum yang baik maka tidak tercapai keadilan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Sehingga dalam kasus *eigenrichting* banyak yang

kurang kepercayaannya kepada aparat penegak hukum, dimana berujung menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri tanpa melaporkan kepada pihak yang berwajib.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum atau yang sering disebut dengan kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dalam kasus *eigenrichting* budaya hukum sangat kental karena kurangnya rasa kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Sehingga ketika terjadi suatu kejahatan mereka menyelesaikannya sendiri dalam hal ini melakukan main hakim sendiri kepada pelaku kejahatan.

Dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Adapun teori-teori kriminologi yang dipakai untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya *eigenrichting* di Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan dalam Perspektif Biologis

Dalam kasus *eigenrichting* yang terjadi di Kota Malang, salah satu faktor kriminogen tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah Teori Psikiatrik. Menurut teori ini interaksi sosial dapat mempengaruhi gangguan emosional seseorang. Hal tersebut dibuktikan kasus II dimana pelaku, melakukan perbuatan *eigenrichting* yang menyebabkan korban meninggal dunia karena emosi dan khilaf. Psikologi tersangka berdasarkan pemeriksaan cukup sehat, tapi kurang interaksi/pergaulan sosial yang menyebabkan gelisah dan agak hiperaktif.

b. Kejahatan dalam Perspektif Psikologis

1) Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami penghuni lembaga pemasyarakatan, yakni sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek dan tidak pernah merasa bersalah. Hal tersebut dibuktikan oleh tersangka *eigenrichting* pada kasus III, dimana

sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara Sajam dengan vonis 6 bulan. Dari hal tersebut tersangka tidak belajar dari kesalahan sebelumnya dan mengulangi lagi melakukan penganiayaan pada tahun 2019 dan salah sasaran.

2) Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Bahwa tersangka yang melakukan *eigenrichting* dalam pengembangan moralnya kurang baik, sehingga tidak bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak. Hal tersebut dibuktikan oleh semua kasus yaitu kasus I, II dan III.

c. Kejahatan dalam Perspektif Sosiologis

1) Teori Ekologis

Menurut I.S Susanto teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial. Lingkungan dan sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang melakukan kejahatan atau tidak. Perilaku menyimpang seseorang dapat terlihat dari lingkungan sekitarnya baik atau buruk dibuktikan dengan kasus I, II dan III.

2) Teori Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor seseorang melakukan kejahatan. Sebagaimana *eigenrichting* yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus I kepada tukang parkir karena saudaranya dianiaya oleh temannya sesama tukang parkir. Dimana pelaku ekonominya menengah ke atas, sedangkan korban sebaliknya. Sehingga dalam hal ini pelaku merasa dapat melakukan semua hal yang diinginkan kepada korban. Karena dalam hal ini korban ekonominya tidak sebaik pelaku, begitupun dengan kasus II yang keadaan ekonomi pelaku lebih dari korban.

d. Kejahatan dari Perspektif Lain

1) Teori Labeling

Pemberian sanksi atau label kepada orang yang melakukan kejahatan dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan, justru sebaliknya. Pemberian label justru menjadi

penyebab seseorang menjadi jahat atau tetap melakukan kejahatan. Karena hukum sosial masyarakat lebih kejam dan dampaknya ke psikologis seseorang, sebagaimana pelaku dalam kasus III. Sehingga pelaku beranggapan untuk melakukan kejahatan lagi karena masyarakat sudah menilai jelek kepada dirinya dan juga pelaku tidak bisa belajar dari pengalaman.

2) Teori Konflik

Seseorang melakukan *eigenrichting* sebelumnya didasarkan adanya konflik terlebih dahulu. Hal tersebut dibuktikan oleh semua pelaku pada kasus I, II dan III. Dimana tindakan main hakim sendiri berawal dari konflik yang dibuat oleh korban, yang memicu pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.

3) Teori Kontrol

Lemahnya ikatan individu dan sosial di masyarakat atau macetnya integrasi sosial menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan. Kurangnya pergaulan individu dengan masyarakat bisa membuat psikologis seseorang lemah. Hal tersebut dibuktikan oleh pelaku dalam kasus II, dimana pelaku kurang pergaulan sosial yang membuat dirinya menjadi gelisah dan agak hiperaktif.

Pendidikan juga menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan. Tingkat Pendidikan yang rendah, bisa menyebabkan seseorang kesulitan untuk berfikir dengan baik. Rendahnya Pendidikan mengakibatkan lemahnya psikologis seseorang. Psikologi Pendidikan merupakan hal yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan proses sosial yang menghadapkan seseorang pada lingkungan yang terkontrol sehingga seseorang dapat mencapai perkembangan sosial yang maksimal dan lebih optimal. Pendidikan tidak hanya formal, tetapi juga non formal. Pada kasus I dan II pendidikan terakhir yang ditempuh oleh para pelaku hanya Sekolah Dasar (SD) tidak tamat. Untuk pelaku kasus III pendidikan terakhir SMA (tamat). Dari hal tersebut dapat dilihat, bahwa tingkat Pendidikan pelaku rendah, sehingga kemampuan

berfikir untuk membedakan antara yang diperbolehkan dan dilarang mengalami kesulitan.

4) Teori NKK

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan. Semua kasus *eigenrichting* yang terjadi di Kota Malang (kasus I, II dan III) didasarkan karena adanya niat dari diri pelaku dan kesempatan, meskipun tujuan akhirnya berbeda. Ada yang salah sasaran karena tersulut emosi dan ada yang meninggal dunia, meskipun tujuannya tidak ingin menyebabkan meninggal dunia.

Strategi Penanggulangan *Eigenrichting* yang Ideal dengan Pendekatan Teori Kriminologi di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota

Strategi penanggulangan kejahatan dalam hal ini *eigenrichting* secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis dan saling melengkapi. Pada dasarnya suatu penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa *eigenrichting* sangat merugikan bagi pihak korban dan keluarga.

Hal tersebut telah melanggar asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas praduga tak bersalah merupakan perwujudan hak asasi manusia yang memberikan perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi.³¹ Selain itu *eigenrichting* melanggar asas proporsionalitas, yaitu dimana pelanggaran

³¹ Nuhasan, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 17 No. 3, Tahun 2017, Hlm. 213.

kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang, jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Oleh sebab itu perlu strategi penanggulangan yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan mengkaitkan sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, diantaranya:

a. Penanggulangan Kejahatan dengan Upaya Penal

Upaya penanggulangan melalui jalur penal disebut dengan jalur hukum pidana, yang menitikberatkan pada upaya represif. Upaya yang dilakukan tidak terlepas dari sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diantaranya: Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan, Kpengacaraan, yang keseluruhan saling berhubungan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar.

Dalam melakukan penanggulangan melalui upaya penal antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemerintah perlu merumuskan *eigenrichting* di dalam RUU-KUHP sebagai alasan pemberat. Karena hal tersebut erat kaitannya dengan pengaturan *eigenrichting* dimana secara substansi hukum KUHP belum secara khusus mengaturnya, yang masih menggabungkan *eigenrichting* ke dalam semua pasal tindak pidana dalam KUHP. Tetapi jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut harus dibuktikan unsur tindakan main hakim sendiri. Dimana tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk menghukum suatu pihak melakukan kejahatan tanpa melalui proses hukum. Sedangkan apabila seseorang murni melakukan penganiayaan, tanpa ada unsur korban melakukan kejahatan sebelumnya, tidak bisa dikenai tindakan main hakim sendiri. Sehingga perumusan *eigenrichting* masih belum jelas dan perlu dirumuskan di dalam RUU KUHP.
- 2) Perumusan yang belum jelas di dalam KUHP sehingga banyak pelaku yang tidak jera terhadap hukuman yang diberikan. Maka

perlu adanya hukuman tambahan terhadap pelaku *eigenrichting*, diantaranya:

- a) Hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi tersebut menurut Jan Remmelink, merupakan penderitaan yang serius karena berkaitan dengan nama dan martabatnya. Sanksi tersebut memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya karena lingkungan sekitar sudah mengetahui perbuatannya. Pengumuman putusan hakim dilakukan dengan pemberitaan di surat-surat kabar yang dibiayai oleh terpidana. Hal tersebut juga memiliki tujuan preventif agar masyarakat lebih berhati-hati.
- b) Hukuman tambahan berupa Bela Negara yang dilakukan di dalam lapas terkait hukum negara dan hukum agama, dikaitkan dengan berdirinya negara kesatuan. Ketika sudah selesai masa pidananya maka narapidana harus mempunyai sertifikat bela negara. Di dalam lapas juga perlu dibuatkan pondok pesantren, agar membantu para narapidana belajar agama.
- 3) Sinergitas sub-sistem aparat penegak hukum dengan baik bertujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

b. Penanggulangan Kejahatan dengan Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana, yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Adapun penanggulangan secara non penal terhadap *eigenrichting* di Kota Malang adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Pendidikan Formal dan Non Formal

Peningkatan pendidikan formal sangat penting untuk membentuk pribadi seseorang dengan baik. Berdasarkan kasus *eigenrichting* yang terjadi di Kota Malang disebabkan karena

rendahnya pendidikan. Dimana pelaku kasus I dan II Pendidikan terakhirnya SD tidak tamat, serta pelaku kasus III pendidikan terakhirnya SMA. Begitupun dengan Pendidikan non formal sangat berperan penting pada pribadi seseorang. Pendidikan menjadi penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Jika agama seseorang baik maka moralnya juga baik, sehingga seseorang mampu membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, seseorang akan berfikir dua kali untuk melakukan hal tersebut.

2) Pendidikan Bela Negara di Masyarakat

Lembaga agama yang berada di setiap Kab/Kota saling bersinergi seperti MUI, PCNU, PCMuhammadiyah, tokoh lintas agama dan FKUB membuat pendidikan non formal di lingkungan sekitar. Memasukkan kurikulum bela negara ke dalam Pondok Pesantren dan Sinode Gereja. Serta Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah terkait bela negara.

3) Penyuluhan oleh Kepolisian

Penyuluhan oleh pihak Kepolisian termasuk dalam penanggulangan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai dan moral dalam diri seseorang. Upaya ini merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya kejahatan. Dalam penerapannya meskipun seseorang ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niat, maka tidak akan terjadi kejahatan. Karena dalam dirinya sudah tertanam bahwa hal tersebut tidak patut untuk dilakukan.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Kepolisian juga bertujuan agar masyarakat paham hukum. Khususnya penyuluhan tentang *eigenrichting*, bertujuan agar masyarakat sadar akan hukum sehingga tidak mengambil tindakan sendiri yang membahayakan orang lain, melainkan menyerahkan sepenuhnya ketika terjadi kejahatan di lingkungan sekitarnya kepada pihak berwajib.

4) Patroli dan Pengawasan oleh Polisi dan Aparat Keamanan Lain

Patroli bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, karena secara langsung Polisi akan turun tangan ketika mengetahui ada seseorang melakukan kejahatan. Sehingga masyarakat tidak mudah melakukan tindakan di luar aturan hukum yang ada. Patroli juga tidak hanya dilakukan oleh Polisi, tetapi juga aparat keamanan lainnya yang saling bersinergi diantaranya hansip, POL PP, satpam dan lain sebagainya.

5) Peningkatan Kesadaran Hukum dan Solidaritas Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sangat diperlukan, agar masyarakat paham dalam melakukan sesuatu yang dilarang dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Solidaritas di dalam lingkungan bermasyarakat juga harus ditingkatkan, karena salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah psikologisnya terganggu, hal tersebut dikarenakan kurang bergaul. Seperti salah satu tersangka *eigenrichting* (kasus I) berdasarkan pemeriksaan psikologi menyatakan bahwa kurang pergaulan sehingga mengakibatkan gelisah dan agak hiperaktif.

6) Penerapan POLMAS

Perkapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Dimana melibatkan masyarakat melalui kemitraan Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Bentuk *eigenrichting* yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota diantaranya pengeroyokan, pembunuhan dan penganiayaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 170 jo Pasal 53 jo Pasal 55, Pasal 338, Pasal 340 dan Pasal 351 KUHP. Dimana sebelumnya sudah terjadi konflik yang dipicu oleh pelaku serta alasan pelaku melakukan *eigenrichting* karena kurangnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum dan tidak bisa mengumpulkan alat bukti untuk dilaporkan kepada pihak berwajib.

- b. Faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi *eigenrichting* di wilayah hukum Polresta Malang Kota adalah sebagai berikut: faktor biologis (teori psikiatrik), faktor psikologis (kekacauan mental dan pengembangan moral), faktor sosiologis (teori ekologis dan faktor ekonomi) dan faktor perspektif lain (labelling, teori konflik, teori kontrol dan teori NKK).
- c. Strategi penanggulangan *eigenrichting* di wilayah hukum Polresta Malang Kota dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal diantaranya memasukkan *eigenrichting* ke dalam RUU KUHP, hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan bela negara, serta sinergita aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan baik dan benar. Upaya non penal dilakukan dengan melibatkan semua komponen di masyarakat, dengan cara peningkatan pendidikan formal dan non formal, pendidikan bela negara di masyarakat, penyuluhan oleh kepolisian, patroli dan pengawasan oleh polisi dan aparat keamanan lain serta penerapan POLMAS.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dengan adanya penelitian hukum ini, Penulis berharap:

- a. Untuk Pemerintah, *eigenrichting* belum diatur secara khusus dalam KUHP, dimana tidak menjelaskan unsur seseorang dikatakan melakukan *eigenrichting*. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan khusus dalam RUU KUHP yang mencantumkan *eigenrichting* sebagai alasan pemberat dijatuhkannya pidana dalam semua tindak pidana yang terdapat di KUHP. Sehingga aparat penegak hukum tidak kesulitan dalam merumuskan tindakan main hakim sendiri. Serta perumusan terkait pidana tambahan

berupa bela negara dan pengumuman putusan pengadilan. Bela negara untuk masyarakat perlu dibuatkan Peraturan Daerah.

- b. Untuk Aparat Penegak Hukum (Polisi, Hakim, Jaksa, Badan Pelaksana Pidana/Lapas) harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Untuk Kepolisian dapat melakukan penyuluhan dan patroli dengan aparat keamanan lainnya.
- c. Bagi tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman agama kepada masyarakat tentang larangan main hakim sendiri karena tindakan tersebut dosa, apalagi tindakan main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain tidak dibenarkan pada agama mana pun. Serta menyelenggarakan pendidikan bela negara.
- d. Untuk Masyarakat, turut andil dalam kegiatan apapun yang ada di lingkungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan interaksi sosial yang baik antara satu dengan lainnya. Sering mengikuti pelatihan maupun penyuluhan hukum agar meningkatkan kesadaran hukum.

Daftar Pustaka

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 2018, Jakarta: Prenadamedia Group
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Adami Chazawi, 2002, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama.
- Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Fitriati, *Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis*, MMH, Jilid 41 No. 2 April 2012.

- I.S. Susanto, 1991, *Diktak Kriminologi*, Semarang: PT. Tiga Serangkai.
- Lawrence Friedman, 1977, *Law and Society*, an Introduction.
- Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Kasus Begal*, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VII, No. 05/I/PEDI/Maret/2015, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumnus.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nonet dan Zelnick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper Torchbooks.
- Nuhasan, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 17 No. 3, Tahun 2017.
- Nurchayaningih, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.
- Rayon Syaputra, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti*, JOM Fakultas Hukum, Volume 1 Nomor 1, Februari 2015.
- Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyowati Irianto, 2009, *Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Wartiningih, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura*, Jurnal Skripsi Rechtidee, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.